

KUNJUNGAN DIPLOMASI PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TAHUN 1999-2001

Andi Purwono, Hilman Najib

*Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia*

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui alasan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan kunjungan diplomasinya pada tahun 1999 sampai 2001. Penelitian ini ditulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Seperti buku, dokumen resmi negara, internet, sosial media, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan teori dasar diplomasi yang berfokus pada pesan penting yang dikomunikasikan oleh antar aktor secara bilateral maupun multilateral. Penelitian ini menemukan alasan kunjungan diplomasi Presiden Gus Dur karena dipengaruhi oleh adanya faktor Perbaikan Ekonomi Nasional Pasca Reformasi serta Stabilitas Politik dan Keamanan dalam negeri.

Kata kunci: *Kunjungan; Ekonomi; Politik; Keamanan Nasional*

A. Pendahuluan

Setiap negara di dunia memiliki wewenang untuk dapat melakukan diplomasi dengan negara lainnya. Fungsi utama diplomasi secara umum adalah untuk menjaga perdamaian antar negara. Di dalamnya ada beberapa aktivitas seperti negosiasi, kesepakatan perdagangan, menangani perselisihan, diskusi masalah, dan menerapkan kebijakan baru. Sedangkan tujuan utama diadakannya diplomasi adalah untuk pengamanan kepentingan nasional, kepentingan politik, dan integritas teritorial (KataData, 2022).

Indonesia merupakan negara yang sering melakukan praktek diplomasi ke berbagai negara. Di bulan April tahun 1946, setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, Indonesia mengirimkan misi diplomatik untuk yang pertama kalinya ke Belanda berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda. Beberapa bulan kemudian tepatnya di bulan Agustus, Indonesia melangsungkan diplomasi lagi dengan memberikan bantuan beras untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Lalu pemerintah India membalasnya dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia. Begitupun

hingga sekarang, pemerintah Indonesia masih melakukan diplomasinya ke berbagai negara (Kemlu RI, 2022).

Dalam perjalanan diplomasinya ke mancanegara, Indonesia pernah mengalami tiga macam roda pemerintahan yang berbeda yaitu pemerintah orde lama, orde baru, dan reformasi. Di antara tiga masa tersebut, terdapat satu pemerintahan yang mengalami durasi kepemimpinan yang tidak genap sampai 5 tahun, yaitu masa reformasi yang dipimpin oleh BJ. Habibie dan pasca reformasi yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Setelah menjalankan roda pemerintahan satu tahun, BJ. Habibie pada tanggal 19 Oktober 1999 membacakan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden. Dengan berakhirnya BJ. Habibie dari jabatan Presiden, maka roda pemerintahan berikutnya dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur dianggap dapat menggantikan posisi BJ. Habibie sebagai Presiden selanjutnya pasca reformasi, dikarenakan Ia mempunyai banyak sekali pengalaman di dalam negeri hingga luar negeri. Selain itu Ia juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) pada tahun 1984-1999 (Sindonews, 2022). Melalui berbagai macam proses dan prosedur pemerintahan yang ada, akhirnya terpilihlah Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat pada 20 Oktober 1999.

Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI), Abdurrahman Wahid (Gus Dur) perlahan mulai menjalankan tugas-tugasnya sebagai Presiden, yaitu menjalankan pemerintahan dan kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara (KataData, 2022). Adapun salah satu yang menonjol dari Gus Dur sewaktu menjabat sebagai Presiden ialah kunjungan-kunjungannya ke banyak negara yang hanya membutuhkan waktu singkat.

Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu bentuk diplomasi yang sering dilakukan selama pemerintahan berlangsung. Dan diplomasinya tersebut diistilahkan dengan Diplomasi Maraton, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus (tanpa berhenti) (KBBI, n.d.). Gus Dur terbukti melakukannya secara Maraton, dari satu negara ke negara-negara lainnya. Tidak hanya itu saja, walaupun Gus Dur sudah mempunyai Menteri Luar Negeri yang bernama Alwi Shihab dan berbagai duta besar yang tersebar di seluruh dunia, tapi Ia melangsungkan diplomasinya sendiri ke pemimpin-pemimpin negara mulai dari bulan November 1999 sampai Juni 2001.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai kepentingan Indonesia dalam kunjungan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999-2001. Maka dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Mengapa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) banyak melakukan kunjungan diplomasi di masa kepresidenannya?”

Penulis menggunakan teori dasar dalam hubungan internasional yaitu diplomasi. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi alasan Presiden Gus Dur melakukan kunjungan diplomasi di tahun 1999 sampai 2001. Diplomasi merupakan alat atau instrumen negara dalam Hubungan Internasional. Dalam prakteknya diplomasi harus dibedakan dengan politik luar negeri, oleh karena itu diperlukan adanya batasan di antara kedua konsep tersebut. Yang mana, diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain.

Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik”. Di satu pihak, kebijakan atau politik luar negeri memiliki perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri, dan dipihak lain, perhatian diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri.

Studi terdahulu tentang diplomasi menyebut bahwa ada dua makna penting dari diplomasi yaitu representasi dan komunikasi. Diplomasi sering didefinisikan sebagai proses komunikasi antarnegara melalui perwakilan yang diakui. Oleh karena itu, diplomasi sering dimaknai sebagai proses komunikasi yang diatur (Costantinou: 1996:25). Salah satunya yang digunakan pada skripsi ini adalah diplomasi sebagai proses komunikasi untuk menyampaikan pesan negara kepada aktor Hubungan Internasional lain demi kepentingan nasionalnya. Kunjungan pejabat negara ke luar negeri dengan demikian adalah diplomasi untuk menyampaikan pesan negara kepada aktor Hubungan Internasional lain demi kepentingan nasionalnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan menggunakan metode kualitatif, hal ini dikarenakan data yang diperoleh oleh penulis adalah data kualitatif yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan serata menganalisa kondisi-kondisi atau peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis adalah melalui

studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik cetak ataupun non-cetak. Sumber literatur cetak, di antaranya ialah buku-buku biografi ataupun perjalanan karir Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden RI.

Adapun sumber literatur non-cetak, di antaranya ialah berupa website (internet) yang memuat data-data seperti jurnal, arsip nasional, surat kabar, makalah, serta sumber-sumber artikel yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta dari media sosial youtube yang memuat pidato-pidato Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Menteri Luar Negeri Alwi Shihab ataupun pernyataan dari tokoh-tokoh terdekat Gus Dur selama menjadi Presiden. Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder pada dasarnya adalah jenis data penelitian yang sudah dikumpulkan orang lain atau tidak secara langsung diperoleh peneliti dari lapangan. Hal ini sesuai dengan apa yang dirinci pada teknik pengumpulan data di atas.

C. Hasil dan Pembahasan

Alasan yang membuat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan kunjungan diplomasi di tahun 1999-2001 pada masa pemerintahannya adalah karena adanya faktor Perbaikan Ekonomi Nasional Pasca Reformasi serta Stabilitas Politik dan Keamanan dalam negeri. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan tersebut, dibawah ini penullis akan memaparkan variabel-variabel penyebabnya.

1. Alasan Politik Keamanan

Salah satu hal penting yang dikomunikasikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kunjungannya adalah bidang politik keamanan. Di bidang ini Presiden Gus Dur berusaha meraih dukungan luar negeri bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena pada masa pemerintahan Gus Dur, politik keamanan di dalam negeri sedang tidak stabil. Indonesia dihadapkan beberapa permasalahan di antaranya disintegrasi Aceh, Irian Jaya (Papua), dan Poso (Maluku).

Permasalahan Aceh, Irian Jaya, dan Maluku pada awal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak begitu menonjol dalam agenda kunjungan-kunjungan diplomasi Gus Dur, meskipun ketiga daerah tersebut telah mengancam persatuan nasional. Maka agar tugas Presiden menjadi lebih ringan, Presiden Gus Dur mendelegasikan tugas penyelesaian masalah Irian Jaya dan Maluku kepada Wakil Presiden Megawati dan Aceh untuk dirinya sendiri (Soesastro, 2022).

a. Aceh

Daerah konflik di Indonesia yang menjadi alasan kuat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk tetap melangsungkan kunjungan diplomasinya ke banyak negara yang

pertama adalah daerah Aceh. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya pernyataan Gus Dur saat dikritik oleh beberapa oknum yang tidak setuju dengan kunjungan-kunjungan diplomasinya setelah Gus Dur menjalankan kunjungan negara yang ke-23. Gus Dur saat itu kembali menegaskan ke publik, bahwa tujuan kunjungan diplomasinya selama di luar negeri adalah untuk mengembalikan nama baik Indonesia, berharap investor menanamkan modal lagi, dan mencari dukungan internasional terhadap keutuhan Aceh sebagai bagian dari Indonesia (Shambazy, 2022).

Isu disintegrasi Aceh di Indonesia, selama masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kenyataannya masih belum selesai. Dalam sejarah singkatnya, konflik ini bermula pada saat kebanyakan masyarakat Indonesia masih berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pasca kemerdekaan tahun 1948. Saat itu lahir pemerintah darurat RI (PDRI) (Abdullah, 2001) di bawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan menetapkan Aceh sebagai ibu kota dan pusat komando Panglima Sumatera di bawah Komando R. Hidayat.

Kutaradja atau yang sekarang dikenal Banda Aceh digunakan sebagai pusat pembinaan Angkatan Laut dan Angkatan Udara RI. Namun, sekembalinya Bung Karno (Presiden RI yang pertama) dari Aceh, justru keluarlah surat keputusan Presiden bahwa Aceh hanya sebagai bagian daerah Sumatera Utara dan menjadi bagian kecil Sumatera Utara. Dari sini kemudian mulai muncul konflik disintegrasi bangsa di Aceh.

Ketidakpuasan rakyat Aceh atas keputusan tersebut memunculkan gerakan DI/TII Pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat yang dimanfaatkan rakyat Aceh untuk mengambil kesempatan menentang RI, dengan memproklamkan negara Islam Aceh Darussalam. Sebagai reaksi atas gerakan rakyat Aceh tersebut, Perdana Menteri Muhammad Natsir bersikap pro-aktif melalui pendekatan persuasif dan empatif,¹ sehingga situasi damai dan tenteram dapat terwujud. Aceh mendapatkan gelar "Daerah Istimewa Aceh."

Di era Reformasi, Aceh semakin bergejolak karena di saat yang sama, Indonesia juga sedang menghadapi krisis di berbagai bidang lainnya. Janji Presiden Habibie untuk menuntaskan masalah Aceh juga tidak menjadi kenyataan. Padahal Habibie sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 88 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (BPK, 2022). Namun lepasnya Timor Timur dari pemerintahan Habibie semakin mendorong semangat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melepaskan diri dari NKRI. GAM kemudian menjadi permasalahan cukup besar yang harus

diselesaikan di pemerintahan berikutnya.

Menjelang kerusuhan demonstrasi GAM yang berkejolak di Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Cina (RRC) / Tiongkok. Presiden Gus Dur berangkat kunjungan ke sana di antaranya untuk bertemu dengan Presiden RRC dan mengunjungi masjid bersejarah Niu Jie di pusat kota Beijing. Alasannya karena Presiden Gus Dur ingin mencoba meredakan kekhawatiran atas kerusuhan GAM yang akan meletus di Indonesia. Namun komentar Presiden Gus Dur pada saat konferensi pers menarik banyak perhatian. Bahwa Presiden Gus Dur mendukung tindakan tegas (repressif) dari militer dan polisi Indonesia di Aceh untuk keutuhan dan persatuan bangsa. Presiden Gus Dur selama di Beijing, menyetujui langkah-langkah darurat untuk menangani pemberontak Aceh yang telah berani melawan, sejak Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia pada bulan Agustus 1999.

Pada saat konferensi pers di Beijing, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa sedang mempertimbangkan tawaran Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong untuk mengatur pertemuan dengan para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka. Presiden Gus Dur juga meminta Goh Chok Tong agar ketua kelompok tertinggi dari para pemimpin pemberontak Aceh yang melarikan diri ke Singapura pada tahun 1979, Hasan Di Tiro, tidak perlu diterima lagi di negaranya. Karena Hasan Di Tiro termasuk orang yang pertama kali mempelopori munculnya GAM di Indonesia pada tahun 1976. Dan ia dikabarkan juga berencana mengadakan perayaan besar demonstrasi di Aceh pada tanggal 4 Desember 1999 sekaligus merayakan berdirinya kelompok GAM. Di sisi lain, para pemimpin GAM justru berusaha memberikan jaminan dengan mengatakan bahwa demonstrasi tersebut akan berlangsung secara damai. Tetapi di sisi lainnya lagi mereka takut apabila militer Indonesia memprovokasi dan mengacaukannya. Presiden Gus Dur membawa berita ini saat konferensi berlangsung dan membicarakannya ke dalam lembaga pendidikan tinggi paling bergengsi di China yaitu Universitas Beijing (Associated Press, 1999)

Untuk dapat meminimalisir gejolak GAM dan mempertahankan keutuhan Aceh, sama halnya Keppres Habibie sebelumnya 30 Juli 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 24 Februari 2000 juga ikut mengeluarkan Keppres No. 27 Tahun 2000 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh selama 6 (enam) bulan. Terhitung mulai tanggal 1 Februari Tahun 2000 sampai dengan tanggal 31 Juli Tahun 2000.² Namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat itu menolak

referendum rakyat Aceh, karena bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Ancaman disintegrasi bangsa pun tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan adanya resolusi konflik yang tepat untuk menanganinya (BPK, 2022)

Sebelum dikeluarkannya Keppres No. 27 tersebut, Menteri Luar Negeri RI, Alwi Shihab menyampaikan pidatonya saat berada di Washington, bahwa pemerintah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak akan mentolerir para separatis yang berjuang untuk kemerdekaan di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Tetapi pemerintah siap untuk membahas dan memberikan daerah Aceh dan daerah lainnya berupa otonomi yang jauh lebih besar daripada memilih memisahkan diri dari NKRI. Kata Alwi Shihab, pada 20 Januari 2000 di Universitas Johns Hopkins.

Di Universitas Johns Hopkins Alwi Shihab juga memberikan pesan kepada warga Amerika untuk sementara menghindari bepergian jauh ke daerah Aceh, Irian Jaya dan daerah-daerah disintegrasi lainnya. Karena pasukan keamanan di Indonesia sedang membangun kontrol pengamanan nasional. Pesan itu disampaikan langsung oleh Alwi Shihab kepada Amerika Serikat. Tetapi Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia masih tetap menerima wisatawan-wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Alwi Shihab selain itu mengatakan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan pergi ke Aceh pekan depan untuk memastikan situasi dan kondisi Aceh di sana seperti apa.

Empat hari kemudian Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer datang mengunjungi Indonesia di Istana Negara Jakarta pada 24 Januari 2000. Pembicaraan selama di sana difokuskan pada pecahnya kekerasan provinsi-provinsi terpencil di Indonesia. Seperti halnya Provinsi Aceh. Menteri Luar Negeri Australia lalu menekankan komitmen negaranya untuk memberikan bantuan kepada Indonesia atas keutuhan wilayah Aceh dan berharap mereka para separatis akan mengakhiri kekerasan (Associated Press, 1999).

Satu pekan setelahnya selama kurun waktu 28 - 29 Januari 2000. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melangsungkan kunjungan diplomasinya ke Timur Tengah. Alasan yang dibawa Presiden Gus Dur saat ke Timur Tengah adalah untuk menjaga agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah Aceh tetap terjaga. Saat Presiden Gus Dur ke negara-negara Timur Tengah, Gus Dur meminta ke kepala negara penghasil minyak, Arab Saudi, untuk tidak mendukung Aceh ketika ingin memisahkan diri dari Indonesia. *"Kalau Aceh mau memisahkan diri (dari Indonesia) jangan didukung"* kata Presiden Gus Dur saat meyakinkan negara Arab Saudi (NU.or.id, 2017).

Menteri Luar Negeri Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu Alwi Shihab, pernah menyampaikan bahwa Indonesia sedang berusaha mengedepankan diplomasinya

untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari negara-negara ASEAN, AS, Eropa dan Asia Pasifik, seperti Australia, RRT dan Jepang, terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggapi ancaman disintegrasi nasional, yang dianggap sebagai salah satu kepentingan nasional yang mendesak dan perlu diprioritaskan (Shihab, 2001). Oleh karenanya, pemilihan negara ASEAN merupakan target utama kunjungan luar negeri yang dinilai sangat bijaksana. Memiliki kesamaan visi untuk saling menjaga keutuhan wilayah ASEAN. Setiap negara harus memulainya dari lingkungan tetangga terdekat. Jika terjadi pemberontakan di negara tersebut, negara tetangga bisa menjadi sasaran persembunyian dari kelompok yang menentang pemerintah yang sah. salah satu contohnya, kasus pelarian politik gerilyawan GAM ke Malaysia, yang mengakibatkan perlawanan politik dan perjuangan bersenjata melalui kampanye politik dan penyelundupan peralatan militer.

Saat menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) ke-12 di Brunei Darussalam, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad pada 27 Februari 2000. Presiden Gus Dur bercerita tentang apa yang sedang dihadapi di negaranya terkait dengan politik dan keamanan nasional. Satu bulan kemudian, pada tanggal 9 Maret 2000, Perdana Menteri Malaysia beserta rombongan pemerintah Malaysia kemudian berkunjung ke Indonesia. Mahathir Mohamad menyampaikan pidatonya yang berisi tentang dukungannya terhadap kebijakan Indonesia atas kerusuhan di Provinsi Aceh.

Mahathir menyampaikan bahwa Malaysia saat ini cukup bersedia untuk membantu jika memang diminta dan bahkan pemerintah Malaysia telah bertemu dengan beberapa tokoh agama Aceh – begitupun Mahathir Mohamad juga telah bertemu secara pribadi – dan telah menjelaskan kepada mereka bahwa Aceh harus tetap menjadi bagian dari Indonesia. Mereka sebenarnya memang ingin memiliki lebih banyak otonomi di banding daerah lainnya, tetapi pemerintah Malaysia tidak ingin ikut campur dan tetap mempercayakan pemerintah Indonesia untuk terus melakukan negosiasi (Associated Press, 1999).

Inaya Wahid (putri bungsu) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ingat dalam sebuah kunjungan diplomasinya ke Australia, Presiden Gus Dur pernah menceritakan soal posisi Indonesia di antara negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN yang lain. Presiden Gus Dur menyampaikan bahwa pada ada saat itu Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik, karena baru keluar dari rezim otoriter (orde baru). Bahkan ada banyak konflik di dalam negeri seperti di Aceh dan Papua. Timor Leste baru saja lepas dari Indonesia. Persaksian Inaya Wahid yang ikut saat kunjungan diplomasi ke Australia dalam kurun waktu 24 - 28 Juni 2001.

Kunjungan diplomasi ke Australia tersebut lalu disambut baik oleh Perdana Menteri Australia saat itu, John Howard. Bahkan apa yang telah disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepadanya itu akan disampaikan dalam berbagai forum internasional. *“We respect and support, and will continue to advocate in international fora, the territorial integrity of the Republic of Indonesia, and continue to express our hope that secessionist tensions can be resolved, including through autonomy provisions”* (ABC.net.au, 2022).

Inaya Wahid juga mendengar bahwa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengatakan sewaktu kunjungan di Australia bahwa sekarang posisi Indonesia masih lebih bagus karena masih ada negara Laos dan Myanmar. Menurut Inaya, ungkapan yang dikeluarkan Presiden Gus Dur itu sebenarnya bukan untuk merendahkan Myanmar dan Laos. Melainkan Presiden Gus Dur sedang memberikan sentimen perasaan senasib sepenanggungan, antara Indonesia dengan Laos dan Myanmar (Triono, 2020).

Hal itu karena Laos untuk dapat melindungi keamanan dan pertahanan negaranya, mengandalkan bantuan badan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), Rencana Colombo (Colombo Plan), negara-negara asing, terutama Uni Soviet, Cina, Jerman Timur, Vietnam, dan negara-negara komunis lain. Laos juga dikabarkan menerima lebih banyak bantuan di banding negara manapun di Asia Tenggara termasuk Indonesia.³ Begitupun Myanmar sedang dihadapkan pada konflik wilayah antara Islam dan Budha. Konflik ini muncul karena ada propaganda dari perusahaan-perusahaan asing yang memiliki tujuan yang sama yaitu penguasaan gas bumi. Padahal Myanmar sudah membuat undang-undang untuk melindungi politik dan keamanan negaranya, yaitu The Union of Myanmar Foreign Investment Law yang berisi payung bagi sektor minyak dan gas alam yang melibatkan pihak-pihak asing.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara tidak langsung ingin berpesan, di balik banyaknya krisis di Indonesia khususnya tentang politik dan keamanan dalam negeri di daerah Aceh, ternyata masih ada beberapa negara seperti Laos dan Myanmar yang mengalami ketidakstabilan nasional yang sama.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 12 Mei 2000 menandatangani perjanjian gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan dengan perwakilan GAM di Jenewa. Hal ini dilakukannya untuk mengakhiri kekerasan di wilayah tersebut. Beberapa hari kemudian, 18 Mei 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia menghukum 24 tentara Indonesia dan satu warga sipil yang telah membunuh 57 penduduk desa selama

pemberontakan separatis pada tahun 1999 silam. Kemudian berlanjut dengan adanya gencatan senjata selama tiga bulan diimplementasikan di Aceh pada 2 Juni 2000. Karena situasi tersebut, Presiden Gus Dur lalu meluangkan waktunya untuk mengunjungi Banda Aceh, ibukota provinsi, selama dua jam. Tetapi para pemimpin pemberontak menolak untuk bertemu Gus Dur. Sekitar 12 orang meninggal saat sedang memimpin, dan membawa misteri besar di tahun ini karena jumlahnya menjadi sekitar 800, dua kali lipat jumlah yang tewas pada tahun 1999.

Gencatan senjata tujuh bulan diperpanjang lagi untuk bulan lain, setelah pembicaraan kepada semua pihak di Swiss, bulan Maret 2001. Puluhan tentara marah melacak 15 toko, dua rumah dan kantor dewan desa setelah mencari pemberontak. Amnesty International mengatakan pasukan pro-Jakarta menggunakan taktik intimidasi untuk mengejar aktivis hak asasi manusia di luar provinsi sehingga mereka dapat menyerang pemberontak separatis. 12 Mei 2001, memorandum pemahaman ditandatangani oleh Pemimpin Gerakan Aceh Indonesia dan bebas menerapkan gencatan senjata yang berkelanjutan, dengan maksud untuk memulai proses perdamaian. Memulai negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (Gam) yang terpisah. Mendeklarasikan hukum perkawinan di Maluku untuk memerangi kekerasan sektarian.

Maka di antara langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menyelesaikan ketidakstabilan masalah Aceh di Indonesia adalah dengan membuka peluang dialog terbuka guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melalui dialog, dapat dipahami lebih lanjut tentang apa yang diinginkan rakyat Aceh untuk pembangunan wilayah mereka dan pemerintah juga dapat mengetahui sebab-sebab timbulnya pemberontakan rakyat Aceh yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia.

Selain itu pemerintah juga menciptakan fleksibilitas dalam diplomasi guna tercapainya kesepakatan bersama yang tidak berat sebelah. Hal yang dapat dilakukan di antaranya dengan memperbaiki taraf hidup rakyat Aceh untuk memupuk kepercayaan rakyat demi perdamaian dapat diwujudkan. Sebagai upaya membuka ruang dialog dengan rakyat Aceh, maka pemerintah membutuhkan langkah-langkah strategis, yaitu menghadirkan pihak ketiga dari *International Non-Governmental Organization* (INGO) antara lain Henry Dunant Centre (HDC) pada tahun 1999 dan berakhir di tahun 2003.

Kemudian menghadirkan *Crisis Management Initiative* (CMI) pada tahun 2005. Perjanjian perdamaian GAM yang diperjuangkan pemerintah Indonesia baru membuahkan hasil pada tahun 2005 di Helinski. Akan tetapi perjanjian perdamaian tersebut terlaksana

setelah masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid berakhir. Dengan kata lain, pada masa Reformasi atau yang dipimpin oleh presiden Abdurrahman Wahid belum menemukan titik terang atau keputusan akhir. Hasil kunjungan presiden Abdurrahman Wahid dihitung sebagai langkah Presiden untuk menyelesaikan permasalahan GAM/ Integrasi Bangsa di Indonesia.

Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid guna membahas permasalahan integrasi bangsa yang dilakukan selama masa pemerintahannya belum membuahkan hasil. Perjanjian Perdamaian untuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka) baru terlaksana pada tahun 2005. Perjuangan Presiden Abdurrahman Wahid tetap terhitung sebagai langkah awal penyelesaian permasalahan integrasi bangsa di Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pidatonya di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahwa Indonesia sedang dihadapkan dan ditantang untuk menyelesaikan masalah gerakan separatisme yang bergerak di Aceh dan di Irian Jaya. Di dua wilayah itu, diketahui sudah melancarkan kampanye anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang cukup intensif. Pada saat yang sama, kata Gus Dur kita pun berhadapan dengan suasana yang semakin buruk di Maluku, yang menyebabkan pemerintah sampai pada keputusan untuk menerapkan pendekatan darurat sipil di daerah itu. Disharmoni sosial yang melibatkan agama di Maluku tersebut jelas mengandung potensi disintegrasi bangsa yang sangat serius, yang kalau tidak segera dihentikan, bisa saja meluas ke daerah-daerah lain di Indonesia.

b. Irian Jaya (Papua)

Dua bulan setelah dilantik atau tepatnya 30 Desember 1999 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan kunjungan ke Irian Jaya. Presiden Gus Dur berani membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup, termasuk dengan pimpinan gerakan Irian Jaya Merdeka (cikal bakal adanya OPM). Presiden Gus Dur memprioritaskan untuk membangun rasa saling percaya dengan masyarakat Irian Jaya. Dengan adanya kunjungan Presiden Gus Dur ke Irian Jaya, membuat masyarakat Irian Jaya perlahan mulai merasa diperhatikan kembali oleh pemerintah Indonesia.

Tidak hanya sebatas kunjungan saja, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga memberikan saran agar Irian Jaya berubah nama menjadi Papua karena nama Irian Jaya dinilai olehnya mempunyai makna bahasa arab yang jorok. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua menjadi salah satu cara Presiden Gus Dur untuk mengembalikan harkat martabat masyarakat Papua sebagai sesama warga bangsa Indonesia. Presiden Gus Dur

juga memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai identitas bendera kultural Papua. Dan Presiden Gus Dur juga membantu membiayai penyelenggaraan kongres rakyat Papua (Indonesia.go.id, 2019).

Walaupun sudah ada upaya baik yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Gus Dur masih juga berhadapan dengan kelompok-kelompok separatis yang ada di Papua. Maka Presiden Gus Dur tidak hanya melakukan kunjungan ke dalam negeri melainkan juga melakukan kunjungan diplomasi ke sebuah negara. Kunjungan ke Papua Nugini (PNG). Sebagai bukti keseriusan Presiden Gusdur dalam mendapatkan dukungan internasional untuk kedaulatan Indonesia atas Irian Jaya (Papua), yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Alasan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung ke Papua Nugini (PNG) ialah karena PNG menjadi negara tetangga terdekat dari lokasi Irian Jaya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah PNG secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia atas wilayah Irian Jaya yang bergejolak dan menunjukkan penentangannya. Sikap pemerintah PNG ini cukup serius, karena ditindaklanjuti dengan peningkatan patroli di sepanjang wilayah perbatasan dengan Indonesia yang menjadi wilayah sengketa, dengan tindakan yang akan memulangkan warga Irian Jaya yang masuk atau mengungsi akibat pemberontakan, ke daerah PNG.

Meskipun memiliki hubungan geografis dan budaya dengan warga Irian Jaya, Perdana Menteri Papua Nugini, Sir Mekere Morautahe, secara tegas menyatakan bahwa dirinya sangat menghormati kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Meski dinilai agak terlambat, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah merencanakan kunjungan dalam waktu dekat ke negara-negara besar di kawasan pasifik selatan. Yaitu Australia dan Selandia Baru, yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia dan juga mengalami masalah terkait sikap kontroversial mereka terhadap penyelesaian masalah Timor Timur. Namun kunjungan ke kedua negara yang semula akan dilakukan pada akhir November 2000 itu ditunda karena kuatnya tekanan parlemen (DPR), terkait sikap mereka di Timor Timur yang dinilai tetap arogan, termasuk di posko. Periode referendum, dengan interferences, yang dianggap tidak dapat dimaafkan oleh pihak Indonesia (Pohan, 2019).

Meskipun demikian, ancaman disintegrasi Indonesia semakin memburuk akibat tuntutan pemisahan diri dan kemerdekaan Irian Jaya, serta di tengah kecurigaan adanya dukungan dan intervensi dari tiga negara terhadap gerakan separatis di Irian Jaya, baik PNG, Australia maupun Selandia Baru. Secara umum dapat dinilai masih mendukung keutuhan wilayah Indonesia. Hal ini memang yang perlu diperhatikan dari langkah awal

Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), bahwa kunjungan luar negerinya merupakan permintaan dukungan spontan dan serentak dari negara-negara anggota ASEAN, bagi keutuhan wilayah Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Alwi Shihab, mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Negara-negara Arab serta Iran dan Turki, tanggal 7 Juni 2000. Topik yang dibahas selama di sana ialah tentang sikap pemerintah Indonesia yang menolak deklarasi yang dikeluarkan oleh West Papua yaitu Konferensi Wilayah tentang pemisahan Wilayah dari Indonesia/ Kementerian lalu mengarahkan Wakil tetap Qatar di New York untuk memilih Indonesia dalam hal rancangan resolusi yang ditujukan untuk persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia (Kedutaan Qatar di Jakarta, n.d). Gerakan separatis di Irian Jaya juga dijadikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai topik pembahasan pada saat kunjungannya ke Uni Eropa.

Menurut pernyataan resmi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat bertemu dengan Perdana Menteri Italia, Massimo D'alema, mengatakan bahwa kerjasama ekonomi dan menjalin hubungan bilateralnya itu merupakan bagian dari Tour Eropa, yang mana memiliki misi mencari dukungan Uni Eropa untuk dapat mengendalikan beberapa provinsi separatis Indonesia, khususnya Irian Jaya, serta mempromosikan kerjasama ekonomi agar Jakarta pulih dari stagnansi ekonomi (Kuwaits News Agency, 2000).

c. Poso dan Maluku

Kabupaten Poso adalah salah satu dari delapan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabuten Poso ini memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Kristen di dataran tinggi. Oleh karena Islam dan Kristen mempunyai persamaan dalam segi kuantitas, maka apabila terjadi adanya konflik di daerah Poso, bisa jadi konflik ini berasal dari dua entitas tersebut.

Mulai adanya konflik antara Muslim dan Kristen di Poso, terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Peristiwa Konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan yang bernuansa agama. Dari peristiwa tersebut, kemudian dapat dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kerusuhan ini kemudian berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandangani Deklarasi Malino antara kedua belah pihak (Majalah Tempo, 2003).

Negara-negara sahabat di antaranya seperti Thailand, Myanmar, Kamboja dan Filipina, juga sedang menghadapi masalah domestik yang sama dengan Indonesia perihal

keamanan internal negara masing-masing. Bentuknya ialah berupa perlawanan terhadap ketidakpuasan pemerintah yang baru terpilih atau berkuasa dan juga dalam bentuk ancaman pemisahan diri dari negara. Seiring dengan meningkatnya ancaman separatisme dan disintegrasi di Indonesia pasca tumbanganya Soeharto, maka sudah sewajarnya komitmen politik terhadap integritas teritorial masing-masing negara ASEAN semakin menguat.

Sejalan dengan prinsip non-intervensi yang telah lama dianut oleh ASEAN, upaya untuk tidak memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok separatisme di negara-negara sahabat dari anggota ASEAN memungkinkan untuk bersama-sama membantu memberikan solusi atas masalah yang terbilang sangat konstruktif. Salah satunya ialah bagi kelompok yang terlibat konflik di Maluku, antara Islam dengan Kristen. Selain sebagai dukungan dari para negara sahabat untuk Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pidatonya di depan MPR tanggal 7 Agustus 2000, mengatakan bahwa perluasan investasi untuk dapat memulihkan perekonomian dengan alasan persatuan dan kesatuan antar kelompok di dalam negeri dapat diamati melalui kasus di Maluku. Pada tanggal 19 Januari 1999, kasus ini muncul oleh sebab permasalahan sederhana. Salah seorang warga Ambon yang mayoritas beragama Kristen memeras ekonomi seorang warga Batu Merah yang mayoritas beragama Islam. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka yang terus berkembang menjadi kerusuhan hampir seluruh wilayah Maluku.

Itu artinya, lanjut pidato Presiden Gus Dur bahwa secara politik, negara dan bangsa kita kini, menurutnya sedang berhadapan dengan ancaman disintegrasi teritorial melalui gerakan separatisme, dan ancaman disintegrasi kebangsaan melalui konflik antar pemeluk agama dan antar suku. Oleh karena itu, sekali lagi tiada pilihan lain bagi kita semua kecuali harus menyatukan langkah dan mengerahkan seluruh tenaga yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental tersebut. Pidato ini disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2000.

Walaupun sedang terjadi konflik antar agama di Maluku, kepemimpinan baru oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bagi negara lain merupakan jaminan bagi negara-negara kecil di ASEAN, seperti Singapura. Presiden Gus Dur bahkan mengatakan bahwa akan terus menjaga sikap toleransinya terhadap adanya perbedaan dan politik kelompok lemah. Misalnya minoritas Tionghoa, yang sebelum Suharto jatuh sering menjadi kambing hitam atas masalah ekonomi dan politik yang sedang berlangsung. Ataupun minoritas-minoritas lainnya seperti halnya di Maluku yang membutuhkan perhatian khusus agar toleransi agama di sana dapat terjalin dengan baik. Presiden Gus Dur kemudian mulai

menjalin perbaikan hubungan antara Indonesia dan Singapura.

Permasalahan domestik di Maluku, terbukti telah mendapat perhatian langsung dari Raymond Chan, Menteri Kanada sekaligus sekretaris negara untuk Asia dan Pasifik. Pada tanggal 13 April 2000, Ia berkunjung ke Indonesia untuk menemui Menteri Hak Asasi Manusia, Hasbullah Saad dan menghadiri konferensi pers di Jakarta. Tujuan utama Raymond Chan berkunjung ke Indonesia adalah untuk mencari tahu sekaligus melaporkan ke pemerintahannya terkait dengan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Indonesia. Reymond Chan dalam kunjungannya itu dia menyampaikan keprihatinan Ottawa atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan sektarian yang sedang berlangsung antara Muslim dan Kristen di pulau-pulau Maluku - yang telah merenggut sekitar 3.000 nyawa pada tahun 1999 lalu. Tetapi Raymond Chan senang mendengar pernyataan, bahwa Megawati Soekarnoputri (wakil presiden Gus Dur), selama konflik Maluku berlangsung telah melakukan banyak cara untuk rekonsiliasi kelompok masyarakat di Maluku.

Tidak hanya Wakil Presiden RI saja yang melakukan rekonsiliasi di Maluku, sebelum melakukan kunjungan diplomasi ke Afrika Selatan, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa salah satu topik utama diskusi yang dibawa selama di Afrika Selatan adalah untuk mengetahui proses "kebenaran dan rekonsiliasi" gaya Afrika Selatan yang diperkirakan cocok diaplikasikan untuk Indonesia dalam menyelesaikan konflik Maluku. Presiden Gus Dur saat itu melakukan kunjungan langsung kepada Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, di Pretoria pada Minggu pagi, 9 April 2000 (AFP, 2000).

Sebelum melakukan kunjungan ke Afrika Selatan, pada tanggal 2 Februari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melangsungkan kunjungan diplomasi ke Belanda. Saat tiba di Bandara Schiphol, Presiden Gus Dur langsung disambut oleh para demonstran Maluku Selatan di sana. Mereka mendesak Presiden Gus Dur untuk segera mengakhiri kekerasan Kristen-Muslim di Maluku (Van den Berge, 2022). Salah satu tujuan Presiden Gus Dur ke Belanda juga masih ada hubungannya dengan konflik Maluku di Indonesia. Saat menuju ke Istana Noordeinde di Deenhag Belanda, Presiden Gus Dur bertemu dengan Ratu Beatrix dan Pangeran Claus. Presiden Gus Dur dengan Ratu Beatrix membicarakan seputar masalah investasi Belanda di Indonesia yang sempat terhenti di tahun 1992, permasalahan Maluku, dan permasalahan mengenai hubungan Indonesia dan Belanda terkait Revolusi Kemerdekaan Indonesia, di mana Belanda masih mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 (Kemdikbud, 2022).

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sebuah pernyataannya mengatakan,

"Belanda adalah rumah kedua saya". Hal ini telah dipublikasikan secara luas berbagai media Belanda. Bagi Presiden Gus Dur memang perlu memperluas gagasannya selama di sana dengan alasan untuk dapat mengusulkan temannya, mantan Perdana Menteri Belanda, R. Lubbers, yang sudah merelakan untuk membantu menyelesaikan konflik Maluku di Indonesia.

Sumber lain mengatakan bahwa negarawan Belanda tidak diharapkan dapat mendamaikan kelompok Maluku yang bertikai, tetapi Belanda masih dapat diharapkan untuk memberi nasihat untuk Indonesia dan membantu membangun kembali Maluku dalam jangka panjang. Posisi yang diperankan oleh Presiden Gus Dur terhadap orang-orang Belanda-Maluku (termasuk beberapa "RMS" yaitu para pemimpin separatis Maluku Selatan) dalam membantu tanah air Indonesia, sangat dihargai penuh selama di Belanda. Meski hanya sebatas bantuan kemanusiaan dari Belanda, hal itu dapat membantu masyarakat Indonesia di Maluku menjadi lebih sadar akan masalah sulit yang terjadi di tanah airnya. Apresiasi ini akhirnya membuat masyarakat separatis Maluku lebih memilih otonomi daripada memimpikan kemerdekaan (Santoso, 2000).

2. Alasan Ekonomi: Dorongan Investasi Pasca Krisis Moneter

Dalam pidato besar pertamanya di Bali, Presiden baru Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pada tanggal 24 Oktober 1999 menguraikan perubahan besar dalam kebijakan dalam negeri, luar negeri dan pertahanan. Di dalam pidatonya, Presiden Gus Dur berjanji untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dengan meningkatkan ekonomi negaranya yang dilanda krisis di depan para pebisnis, politisi dan diplomat (Associated Press, 1999).

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut permasalahan ekonomi di masa pemerintahannya menjadi masalah yang paling berat baginya. Hal ini pernah disampaikannya secara langsung dalam acara Pengumuman Kabinet Baru Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 25 Oktober 1999. Isi pidatonya di antaranya, Pertama, Presiden Gus Dur ingin mencapai pencegahan yang disebut disintegrasi wilayah Indonesia dengan cara akan terus mengikatnya. Kedua, Presiden Gus Dur ingin menghancurkan masalah yang paling berat (bagi negara), yaitu masalah ekonomi. Ketiga, mengatur pemerintahan yang layak untuk memenuhi kebutuhan negara (Associated Press, 2000).

Permasalahan ekonomi disebut paling berat, karena pada masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Indonesia masih mengalami krisis ekonomi secara

signifikan. Krisis ini dimulai pada pertengahan tahun 1997 oleh sebab nilai tukar rupiah yang meluas tanpa adanya keseimbangan yang sistematis. Sepanjang tahun 1998, rupiah terdepresiasi menjadi lebih dari 70 persen dan mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998. Nilai tukar ini mencapai Rp. 14.700 per US\$ (Karmeli dan Fatimah, 2008). Hingga pada tahun 1999, saat Gus Dur menjadi Presiden RI, krisis ekonomi masih belum stabil dengan baik.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyadari adanya krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kondisi global saja. Hal ini disampaikan oleh Presiden Gus Dur pada saat Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi yaitu kita harus berani mengakui bahwa bencana krisis ekonomi yang menimpa kita juga disebabkan oleh lemahnya institusi yang ada. Seandainya lembaga-lembaga itu (di dalam negeri) cukup kuat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bekerja sesuai dengan standar manajemen modern, krisis tidak akan terjadi dan tidak akan berlangsung lama dan meluas dan dalam. Seperti yang telah terjadi. Oleh karena itu, pembenahan institusi secara menyeluruh menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam mengatasi krisis tersebut. Mereka adalah kunci untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan. Pidato ini disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2000 tentang penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2000.

Lanjut dalam pidato Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, 1998 dan 1999, untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mencegah terjadinya hiperinflasi, diambil kebijakan moneter ketat yang sangat membatasi pertumbuhan jumlah uang beredar. Sementara itu, posisi penerimaan dan pengeluaran negara dirancang untuk memberikan stimulus fiskal agar perekonomian tidak semakin memburuk. Untuk itu, ditempuh kebijakan defisit anggaran negara. Namun, agar kebijakan fiskal tetap selaras dengan kebijakan moneter, pengeluaran defisit tidak dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar, tetapi dengan cara meminjam dari luar negeri.

Hal itu sudah sering dilakukan oleh pemerintahan sebelum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Akibatnya apabila tidak dapat mengembalikannya menyebabkan Indonesia memiliki hutang kepada negara lain. Hutang luar negeri ini bisa terjadi, karena sumber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri tidak mencukupi. Alhasil yang terjadi saat itu adalah penumpukan hutang luar negeri, khususnya hutang swasta yang telah memberikan beban sangat berat bagi pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jumlah hutang luar negeri pada tahun 1996 adalah 74,6 milyar \$AS, sementara cadangan devisa milik Indonesia hanya tersedia 19,1 milyar \$AS

Saat rupiah tertimpa depresiasi, hutang luar negeri melonjak dengan drastis menjadi 102 milyar pada tahun 1999 dan kembali meningkat pada tahun 2000 menjadi 134 milyar US\$. Sedangkan cadangan devisa hanya tercatat 14 milyar US\$. Pembayaran hutang luar negeri tersebut memicu berlarut-larutnya krisis. Diperkirakan pada tahun 1998, devisa yang diperlukan untuk membayar hutang luar negeri tersebut mencapai 36,37 milyar US\$, terdiri atas hutang perusahaan swasta sebesar 27 milyar US\$, hutang perbankan 7-8 milyar dan hutang pemerintah sekitar 2 milyar (Hao, 1998).

Permasalahan hutang luar negeri tersebut mendapat perhatian serius dari negara-negara maju saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhasil melakukan negosiasi dan akhirnya mendapatkan perpanjangan pembayaran hutang (DPR RI, 2001). Hasil negosiasi yang disampaikan Gus Dur ini terjadi pada saat Ia menghadiri sebuah pertemuan bernama Paris Club II pada tanggal 12-13 April 2000. Hal ini diperkuat oleh pidato Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di depan MPR pada tanggal 7 Agustus 2000. Presiden Gus Dur mengatakan bahwa kepentingan nasional yang ditekankan di antaranya perbaikan ekonomi nasional, stabilitas politik dan keamanan melalui diplomasi.

Paris Club merupakan suatu forum informal yang dibentuk secara spontan pada tahun 1950-an oleh negara-negara terkaya di dunia yang menjadi kreditur (pemberi hutang) resmi. Klub ini bertujuan membantu negara debitur (peminjam), khususnya yang menerima pinjaman dari negara-negara kreditur, untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang yang tercermin pada kesulitan neraca pembayaran. Upaya yang ditempuh melalui klub ini, yaitu pertemuan antara negara kreditur dan negara debitur untuk melakukan negosiasi pembayaran hutang bilateral Pemerintah (*sovereign debt*) yang menghasilkan kesepakatan rescheduling hutang (OECD, 1994).

Dalam pertemuan Paris Club II tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berupaya mengembalikan kepercayaan Internasional terhadap Indonesia karena negaranya telah mempunyai hutang luar negeri yang cukup besar. Sebenarnya tidak mudah mendapatkan toleransi perpanjangan waktu pembayaran hutang negara tersebut. Namun karena Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhasil melakukan negosiasi di hadapan negara-negara kreditur dan debitur.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan stempel kredibilitas dari *International Monetary Fund* (IMF) secara langsung agar negara-negara kreditur maupun debitur semakin percaya terhadap Indonesia. Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Gus Dur selama mengikuti Paris Club II. Hal ini tertulis dalam Press Conference 18 April 2000 yang diterbitkan oleh

Ministry of Foreign Affairs Japan, Press Secretary (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2000).

Dari hasil pernyataan yang telah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sampaikan tersebut, Gus Dur secara tidak langsung ingin mempromosikan kepada negara-negara yang mengikuti Paris Club II bahwa Indonesia termasuk negara yang patuh terhadap aturan global dan dapat dipercaya. Secara tidak langsung juga ingin menyampaikan bahwa Indonesia sedang membutuhkan bantuan ekonomi dari luar negeri karena sedang mengalami perekenomomian yang tidak stabil di dalam negeri. Bantuan yang diharapkan adalah yang mampu membantu permasalahan krisis moneter di dalam negeri secara berkelanjutan.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Alwi Shihab, era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan sebuah pernyataan, bahwa untuk dapat meningkatkan hubungan ekonomi luar negeri, maka perlu dilakukan peningkatan diplomasi ekonomi dengan melakukan pendekatan politis bilateral dan multilateral. Pendekatan tersebut bertujuan untuk melakukan terobosan guna meningkatkan hubungan ekonomi pada umumnya dengan memberi perhatian khusus terhadap negara-negara yang memiliki potensi besar. Tekad ini akan diwujudkan dalam keikutsertaan Indonesia di berbagai forum kerjasama ekonomi, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam rangka meningkatkan diplomasi ekonomi di luar negeri dan pemulihan ekonomi dari krisis moneter di dalam negeri, beberapa hari sebelum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melangsungkan kunjungan diplomasinya ke luar negeri, Presiden Gus Dur mendapat kunjungan tamu dari *International Monetary Fund* (IMF). Di dalam pertemuannya tanggal 3 November 1999 itu, Hubert Neiss sebagai perwakilan khusus dari IMF mengatakan bahwa IMF akan bersedia memainkan peran konstruktif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.. Neiss juga menyatakan dukungan atas keinginan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk membantu pertanian dan usaha kecil.

Sehubungan dengan itu, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berpesan dalam pidatonya di Bali pada tanggal 24 Oktober 1999, yang berisi pesan bahwa kita harus berkonsentrasi mengatasi masalah ekonomi dengan prinsip profit motif, serta keikutsertaan kita dalam perdagangan internasional bebas. Berdasarkan itu kita dapat menciptakan orientasi ekonomi baru kita sendiri. Dengan begitu, pendapatan warga biasa akan meningkat secara bertahap. Masih dalam pidato yang sama, Presiden Gus Dur juga bermaksud untuk membangun hubungan ekonomi antara negaranya yang merupakan

negara Islam terpadat di dunia bekerjasama dengan Israel. Presiden Gus Dur mengakui bahwa kerjasama di bidang ekonomi dengan Israel ini merupakan kali pertama bagi Indonesia (Associated Press, 2000).

Namun sejak Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merencanakan akan menjalin hubungan perekonomian dengan Israel, masyarakat Indonesia banyak yang tidak menyetujui. Alasan dasarnya karena perbedaan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia dengan Israel yang menganut Yahudi (Syahrianto, 2021). Selain itu banyak juga belum paham perbedaan antara hubungan ekonomi (perdagangan) dengan hubungan diplomatik.

Berdasarkan keterangann dari New York Times, "Perdagangan dan ikatan budaya adalah benih hubungan diplomatik," Rata-rata orang tidak dapat membedakan antara hubungan dagang dan hubungan diplomatik. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak begitu khawatir dengan hal tersebut. Bahkan Gus Dur berpesan, "Bagi yang menentang atau tidak mau mengerti, saya himbau: tolong dipahami," kata Gus Dur sebelum meninggalkan Jakarta. Indonesia bisa belajar banyak dari Israel di bidang ekonomi dan demokrasi.

Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, yang menemani Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Amerika Serikat, berencana untuk bertemu Presiden Bill Clinton di Washington tanggal 12 November 1999. Alwi Shihab telah berusaha ikut menangkis kritik terhadap pembukaan hubungan perdagangan dengan Israel. Alwi Shihab juga mengatakan itu adalah bagian dari strategi kebijakan luar negeri yang lebih luas untuk memperkuat pengaruh Indonesia dan mempercepat pemulihannya dari resesi ekonomi terburuk dalam 30 tahun.

Seminggu sebelumnya, utusan yang berbasis di Jakarta dari 16 negara Timur Tengah dan Afrika Utara bertemu dengan Alwi Shihab untuk meminta klarifikasi atas keputusan untuk memiliki hubungan perdagangan dengan Israel. Alwi Shihab setelah itu mengatakan kepada para utusan bahwa hubungan perdagangan akan memberikan Indonesia kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi proses perdamaian Timur Tengah dan bahwa Jakarta tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai ada solusi total dari masalah Palestina.

Alwi Shihab sebelum kejadian itu berlangsung telah menjelaskan kepada wartawan Indonesia bahwa pemerintah bertujuan untuk memanfaatkan lobi Yahudi yang kuat di Amerika Serikat dan di tempat lain untuk menarik investasi, perdagangan, dan niat baik ekonomi ke Indonesia. "Israel bukanlah tujuan utama kami, tetapi kami tahu ada anggota

komunitas Yahudi berpengaruh yang memiliki dana besar di dunia,” kata Alwi Shihab, seorang sarjana Muslim yang merupakan profesor tamu di Pusat Studi Agama Dunia Universitas Harvard sebelum menjadi menteri luar negeri. Jika Israel bersimpati dengan Indonesia, mereka akan mendorong orang lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Pendekatan seperti itu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia, yang juga berpenduduk mayoritas Muslim. Perdana Menteri Malaysia Mahathir bin Mohamad, yang saat itu mengadakan pemilihan umum, menyalahkan konspirasi oleh pemodal Yahudi, termasuk George Soros, untuk krisis mata uang pada tahun 1997 yang membuat negara-negara Asia Timur bertekuk lutut. Menlu Alwi Shihab mengatakan bahwa mungkin saja Ia dan Presiden Abdurrahman Wahid akan bertemu George Soros dan tokoh-tokoh Yahudi berpengaruh lainnya dalam perjalanan mereka ke AS.

Pejabat di istana kepresidenan di Jakarta mengatakan bahwa, selain bertemu dengan Bill Clinton di Amerika Serikat (AS), Presiden Abdurrahman Wahid juga akan melakukan pembicaraan dengan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia saat berada di Washington. Mereka mengatakan bahwa Presiden Gus Dur juga akan mendapatkan perawatan untuk penglihatannya yang buruk di Amerika Serikat, sebelum terbang kembali ke Indonesia melalui Jepang awal minggu depan. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengatakan dalam proses diplomasinya bahwa Islam harus ditunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama toleransi dan perdamaian.

Di tengah krisis moneter dalam negeri, Indonesia sangat membutuhkan suntikan modal asing. Sebab apabila negara Indonesia hanya mengandalkan pemodal dari dalam negeri saja, sektor-sektor penting seperti infrastruktur, properti, hingga pariwisata tidak akan berkembang dengan baik. Dampaknya, perekonomian Indonesia tidak bisa berjalan dengan lancar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang selalu menekankan, bahwa kunci pemulihan ekonomi Indonesia adalah kembalinya investor asing (National Archive of Singapore, 1999).

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pidatonya di depan MPR tanggal 7 Agustus 2000, yang berisi bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional terus kita lakukan dengan mengundang masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Sesungguhnya, minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar amat tinggi. Tetapi ini hanya dapat dicapai kalau kita sukses memperbaiki citra Indonesia, sehingga kepercayaan internasional terhadap Indonesia pulih kembali.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah mencanangkan "diplomasi ekonomi"

dalam hubungan luar negeri. Rangkaian lawatan saya beserta beberapa Menteri dan kalangan pengusaha nasional ke beberapa negara sahabat, tiada lain dimaksudkan untuk semaksimal mungkin mengupayakan pemulihan perekonomian nasional kita. Hasil kunjungan pun segera terasa dari adanya dukungan kuat masyarakat internasional terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi dampak krisis dan menjaga integritas wilayahnya. Dari pembicaraan saya dengan para pemimpin dunia itu, saya tahu bahwa mereka semua memberi tanggapan positif dan bersedia mendukung upaya pemulihan ekonomi dan langkah-langkah demokratisasi di Indonesia.

Oleh karena itu tugas dari pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat itu adalah tentang bagaimana cara agar para investor di luar negeri dapat kembali menanamkan investasinya di dalam negeri. Para investor yang sudah menanamkan investasinya di Indonesia lalu memilih untuk melarikan modalnya ke luar negeri disebabkan oleh adanya kondisi ekonomi bangsa yang saat masa reformasi tidak menentu. Akibatnya konflik yang berujung pada aksi-aksi kekerasan sering terjadi di dalam negeri seperti di Aceh, Irian Jaya, Maluku, dan Poso yang saat itu ramai melakukan demonstrasi.

Efek dari aksi-aksi kekerasan tersebut membuat para pemodal asing yang telah menanamkan investasinya di Indonesia melarikan modalnya ke luar negeri. Lalu terjadilah *capital flight* atau pelarian modal. Istilah *capital flight* mengacu pada pelarian atau perpindahan modal dalam jumlah yang sangat besar sehingga menggoyahkan pondasi ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, *capital flight* cenderung mengandung konotasi negatif, di mana terjadinya bisa menimbulkan 'kekacauan' ekonomi.

Terjadinya *capital flight* ini dapat membebani negara-negara terbelakang karena kurangnya modal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. *Capital flight* ini sudah terbilang wajar karena mereka pun para investor tidak mau mengalami kerugian di mana daerah tempat berinvestasinya tidak memiliki jaminan keamanan serta hukum dan juga kestabilan politik secara signifikan. Modal yang dibawa ke luar negeri oleh para investor di Indonesia terhitung sangat besar yaitu mencapai 80 milyar \$ AS (Prasetyantono, 1999). Oleh karenanya pemerintah Indonesia saat masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencari solusi agar para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam rangka memulihkan ekonomi nasional, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melangsungkan kunjungan diplomasinya ke negara Malaysia. Malaysia adalah investor terbesar ke-11 di Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat fokus pada upaya mengatasi dampak krisis keuangan Asia yang meluluhlantahkan perekonomian Indonesia.

Mahathir didampingi oleh Menteri Luar Negeri Syed Hamid Albar, Menteri Keuangan Daim Zainuddin dan para menteri perdagangan internasional dan industri primer., investasi yang dimilikinya sekitar 7,6 miliar dolar AS.

Upaya Indonesia untuk menghidupkan kembali ekonominya, yang merosot 17 persen pada puncak krisis tahun 1998, sangat bergantung pada paket penyelamatan multi miliar dolar AS yang dipimpin IMF. Sebaliknya, Mahathir menolak bantuan dan nasihat IMF dalam menangani krisis. Sebaliknya, ia memberlakukan kontrol modal yang ketat yang dikritik oleh IMF, pejabat Amerika Serikat dan ekonom Barat. Malaysia telah menyatakan bahwa kontrol, yang untuk sementara membatasi orang asing untuk memulangkan investasi mereka, berhasil menstabilkan ekonomi negara.

Tanggal 27 Februari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) langsung melakukan kunjungan diplomasi ke Brunei Darussalam. Presiden Gus Dur mengunjungi Brunei, dengan tujuan untuk mengajak Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, untuk berinvestasi di Aceh. Sultan setuju memberikan dana sebesar USD 2 juta ke Presiden Gus Dur karena Gus Dur dianggap sebagai orang beragama dan ulama. Sultan Brunei yakin uang yang diberikannya itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya (Merdeka.com, 2013). Presiden Gus Dur tidak mengumumkan sumbangan ini ke publik. Sebelum berita tersebut bocor, untuk antisipasinya Gus Dur langsung simpan uang pemberian Sultan Brunei ke dalam rekening pemerintah. Alasannya, Sultan Brunei memintanya untuk merahasiakan uang bantuan tersebut.

Beberapa bulan setelah kunjungan Brunei Darussalam, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melangsungkan kunjungannya lagi ke negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada kurun waktu 9 - 10 Mei 2000. Presiden Gus Dur mengikuti pertemuan itu bersama para pemimpin negara ASEAN. Presiden Gus Dur selama di sana banyak memperoleh kepercayaan finansial oleh karena obrolan-obrolan Gus Dur yang membawa isu krisis nasional di hadapan negara-negara lainnya. Salah satu kepercayaan itu diberikan langsung oleh Singapura, lewat Perdana Menteri Goh Chok Thong. Hasil audiensi dan negosiasi antara Gus Dur dengan Goh Chok Thong, adalah adanya sebuah rencana untuk mendorong para pemodal Singapura masuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia.

Setelah melakukan kunjungan diplomasi ke Singapura dalam kurun waktu 9 - 13 Juni 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melanjutkan kunjungannya ke Amerika Serikat. Di sana Presiden Gus Dur mengadakan pertemuannya dengan Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat. Presiden Gus Dur membawa kepentingan nasional Indonesia

berupa permasalahan ekonomi nasional, dengan harapan agar Amerika Serikat dapat memberikan bantuan pemulihan ekonomi Indonesia. Setidaknya Amerika dapat menjamin bahwa Indonesia sudah aman untuk investasi. Jaminan seperti itu merupakan salah satu yang dituju Presiden Gus Dur selama kunjungan diplomasi di luar negeri. Selain itu juga Ia rutin menawarkan negara-negara untuk berinvestasi di Indonesia.

Sekitar kurun waktu 4-11 September 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyatakan keberhasilannya saat kunjungan diplomasi ke beberapa negara Timur Tengah dan Afrika dalam membuka jalan untuk kerjasama dagang dan investasi. Karena itu, Presiden meminta pelaku bisnis menindaklanjuti jalan yang telah terbuka itu, sehingga segera terealisasi. Harapan tersebut dikemukakan Presiden Gus Dur kepada wartawan sesuai kunjungan diplomasinya ke Yaman, Uni Emirat Arab, Mesir, Nigeria, dan Sudani. Dalam kunjungannya ke Yaman, Presiden Gus Dur juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Ali Abdullah Saleh. Dalam pertemuan tersebut ada komitmen dari pemerintah Yaman untuk membeli persenjataan produksi PT Pindad dan pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Pertemuan tersebut juga akan menindaklanjuti kerja sama dalam bidang perminyakan dan perdagangan barang konsumsi.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Uni Emirat Arab, Indonesia akan menjadikan negara tersebut sebagai gerbang ekspor produk Indonesia ke negara-negara Arab lain. Pada periode 2000-2001 ekspor Indonesia ke negara itu mencapai US\$ 1 miliar. Negara itu adalah sumber devisa yang tidak kalah penting. Peralnya, sekitar 30 ribu tenaga kerja Indonesia bekerja di Uni Emirat Arab dengan rata-rata gaji per bulan sebesar US\$ 200. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengadakan kunjungan ke Mesir sekaligus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi D-8 (Developing Eight). KTT tersebut membuat landasan untuk persiapan menghadapi perdagangan global 2003. Hasil pertemuan tersebut dirumuskan dalam Deklarasi Kairo. Isinya meminta negara maju segera mengambil langkah kongkrit untuk mengurangi beban hutang negara-negara berkembang. Selain itu negara-negara maju pun dituntut untuk berlaku adil dalam perdagangan internasional (Liputan6.com, 2001).

Hingga tahun 2001, investasi yang disetujui Indonesia di China mencapai 841 item dengan nilai investasi yang disepakati sebesar 1,7 miliar dolar AS. China mendirikan 53 perusahaan patungan non-perdagangan dan perusahaan yang dioperasikan bersama di Indonesia dengan total investasi 161 juta dolar AS. Pada akhir tahun 2001, kedua belah pihak mencapai konsensus tentang Bank of China membuka kembali cabangnya di Jakarta (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, n.d.).

Atas kerja keras yang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lakukan selama di luar negeri, dalam upaya menarik para investor untuk mengatasi krisis moneter dalam negeri, maka Gus Dur berharap besar tidak akan ada lagi keraguan dari negara-negara sahabat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga perihal komitmen pemulihan ekonomi dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat, hingga China tidak hanya berbentuk material dan modal saja, melainkan juga rasa kepercayaan yang diberikan bagi pemerintah Indonesia.

Tabel 1. Variabel Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

No	Variabel Dependen	Variable Independen	Bukti	Keterangan
1	Kunjungan Diplomasi Yang banyak di Masa kepresidenan nya	Kebutuhan mengkomunik asikan pesan bidang politik keamanan dan ekonomi	1. Pidato Gus Dur tentang masalah gerakan separatisme 2. Pidato Gus Dur tentang masalah ancaman disintegrasi 3. Gus Dur dikritik Budiarto 4. Keppres No. 27 Tahun 2000 5. Inayah Wahid bersaksi Kunjungan Diplomasi Gus Dur 6. Pidato Gus Dur di Cina 7. Pernyataan Alwi Shihab Dikunjungi	1. http://www.ri.go.id/istana/speech/ind/07agustus00.htm 2. http://www.ri.go.id/istana/speech/ind/07agustus00.htm 3. Shambazy, Politik Luar Negeri Gus Dur http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/02/0253398/.politik.luar.negeri.gus.dur 4. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57772/keppres-no-27-tahun-2000 5. https://youtu.be/ISS31Zh0d hA 6. https://youtu.be/zXi0Jc0FX

	Australia	FQ
	8. Pidato Presiden Baru Gus Dur	7.
	9. Pidato Kabinet Baru Gus Dur	https://youtu.be/NHYrKHavgvgo
	10. Pidato Gus Dur di India	8. https://youtu.be/bgdhttps://youtu.be/GCYOLjZKeps
	11. Pidato Gus Dur di Afrika Selatan	9. https://youtu.be/hI13KuHp
	12. Pernyataan Alwi Shihab IMF	p78
	13. Pidato Gus Dur di Thailand	10. https://youtu.be/yfarmK5Obo
		11. https://youtu.be/PSGxlv3Ee8k
		12. https://youtu.be/fY55c2Jey2A
2	Kebutuhan mengkomunikasikan pesan bidang ekonomi	<p>1. Penyebab Krisis Ekonomi</p> <p>2. Pidato Gus Dur tentang Krisis Ekonomi</p> <p>3. Rupiah mengalami Depresiasi</p> <p>4. Hasil Negosiasi Gus Dur</p> <p>5. Kunjungan Diplomasi Gus Dur</p> <p>6. Pidato Gus Dur di Israel</p> <p>1. Jurnal, Elly Karmeli, Siti Fatimah, <i>KRISIS EKONOMI INDONESIA</i>, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sumbawa.</p> <p>2. https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/gusdur5.pdf</p> <p>3. Zhang Hao, <i>Indonesia di masa Transisi Analisis CSIS</i>, Tahun XXVII/19 98 No 4, hal. 373</p>

-
- | | |
|--|---|
| 7. Pidato Alwi Shihab di Indonesia | 4. Tim Peneliti Hubungan Internasional, <i>Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid</i> , Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta 2001, hlm 150. |
| 8. Pidato Alwi Shihab di AS | 5. |
| 9. Pidato Gus Duri di AS | https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-dan-kasus-kasus-ini-pernah-goyang-pemerintahan-gus-dur.html |
| 10. Pidato Gus Dur di Asean Forum | <i>Jawa Pos</i> , 18 November 1999, hal. 3 |
| 14. Pidato Gus Dur di Venezuela | 6. |
| 15. Wahid's Move on Trade Stirs Up Nationalism Among Muslims : Opening to Israel Vexes Indonesians | https://youtu.be/CG7rBBJqDAU |
| | 7. |
| | https://youtu.be/GwRpi4w-YLQ |
| | 8. |
| | https://youtu.be/Y5CjmbSR |
| | A-c |
| | 9. |
| | https://youtu.be/b8MaG4K9K3g |
| | 10. |
| | https://youtu.be/O2xP2A4iES4 |
| | 11. |
| | https://youtu.be/qiUXVHp7 |
-

-IM

12.

<https://www.nytimes.com/1999/11/12/news/wahids-move-on-trade-stirs-up-nationalism-among-muslims-opening-to.html>

Sumber: Diolah penulis

Adapun hasil dari kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam upaya mencari pemodal asing di luar negeri adalah sebagai berikut:

Penanaman Modal Asing		
Tahun	Jumlah Proyek	Nilai (dalam juta \$)
1997	790	33.832,50
1998	1035	13.563,10
1999	1164	10.890,60
2000	1508	15.413,10
2001	1100	8.979,60

Sumber : BKPM

D. Kesimpulan

Selama masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terhitung singkat yakni mulai tahun 1999 hingga 2001, banyak tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden Gus Dur. Di antara tujuan yang berhasil dicapainya ialah perbaikan ekonomi secara nasional dan menangani disintegrasi bangsa. Kunjungan-kunjungan diplomasinya ke berbagai negara mulai dari benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa hingga Australia memuat beberapa pesan penting di dalamnya. Peran Presiden Gus Dur sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan saat itu, menuntutnya untuk dapat memberikan alasan mengapa kunjungan diplomasi ke banyak negara saat masa pemerintahannya berlangsung secara rutin.

Alasan-alasan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan kunjungan diplomasi ke banyak negara, yaitu karena alasan politik keamanan dan alasan ekonomi.

Alasan politik keamanan di antaranya terjadi di wilayah Aceh, Irian Jaya, dan Maluku. Pertama, menyikapi kasus disintegrasi di Aceh. Presiden Gus Dur saat kunjungan diplomasi ke Tiongkok, Singapura, Australia, Malaysia dan Arab Saudi berpesan agar tidak mendukung pemisahan wilayah Aceh di Indonesia. Kedua, menyikapi kasus disintegrasi di Irian Jaya. Presiden Gus Dur memberikan pesan untuk Papua Nuginia dan negara-negara di Uni Eropa agar dapat membantu mengendalikan Irian Jaya yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ketiga, dalam menyikapi kasus di Maluku. Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan pesan kepada Singapura dan Belanda bahwa Indonesia akan terus menjaga sikap toleransinya terhadap adanya perbedaan (agama, suku, adat, dan budaya) dan politik kelompok lemah. Hal ini agar negara-negara sahabat tetap mau memberikan bantuan tanpa memerdulikan perbedaan agama, suku, adat dan budaya di setiap negara

Adapun alasan ekonomi kunjungan diplomasi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di antaranya ialah berawal dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Aceh, Irian Jaya, Poso dan Maluku hingga mengakibatkan perekonomian Indonesia kembali mengalami krisis berkepanjangan. Dikarekankan suntikan modal bangsa asing yang mulai berkurang karena adanya beberapa kerucuhan yang terjadi di Indonesia. Dalam rangka memulihkan ekonomi nasional, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) salah satunya banyak memperoleh kepercayaan finansial pada saat pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN. Salah satu kepercayaan itu diberikan langsung oleh Singapura, lewat Perdana Menteri Goh Chok Thong. Hasil audiensi dan negosiasi antara Gus Dur dengan Goh Chok Thong, adalah adanya sebuah rencana untuk mendorong para pemodal Singapura masuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia. Maka dengan adanya alasan-alasan politik keamanan dan ekonomi, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di masa pemerintahannya dapat membantu perbaikan ekonomi secara nasional serta dapat menangani disintegrasi bangsa dengan waktu yang cepat dan dampak yang sangat luas.

Daftar Pustaka

Buku

- Greg Barton. 2003. *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid: Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKis
- Umar Suryadi Bakry. 2017. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurul Azizah Zayzda. 2018. *Politik Migrasi Internasional: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Oceania Press

Virdika Rizky Utama. 2019. *Menjerat Gus Dur*. Jakarta: PT. NUmedia Digital Indonesia.

Irwan Suhanda. 2010. *Perjalanan Politik Gus Dur*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

JURNAL

Asep Setiawan, *Teori dan Praktik Diplomasi*, hlm. 2 (Jakarta: 2016)

Emita Distiana, *Masa Reformasi*, (Kalimantan Barat: 2018), hlm. 3.

Budiarto Shambazy, Politik Luar Negeri Gus Dur, 2010
<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/02/0253398/.politik.luar.negeri.gus.dur>

Abbas Abdullah, *Mengapa Aceh Bergolak sepanjang Masa*, Harian Kompas, Minggu, 15 April 2001.

Elly Karmeli, Siti Fatimah, *KRISIS EKONOMI INDONESIA*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sumbawa.

Zhang Hao, *Indonesia di masa Transisi Analisis CSIS*, Tahun XXVII/19 98 No 4, hal. 373.

Tim Peneliti Hubungan Internasional, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta 2001, hlm 150.

“Recheduling is a formal deferment of debt service payments with the application of new maturities to the deferred amounts”. Debt Stocks, Debt Flows and the Balance of Payments. BIS,IMF,OECD,WB:OECD Publications. 1994, 32.

A. Tony Prasetyantono, *Agenda Ekonomi Pemerintahan Baru*, Analisis CSIS, Tahun XXVIII/1999 No. 4 hal 342.

Jawa Pos, 18 November 1999, hal. 3.

WEBSITE

TIRTO.ID, *Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa*, 2014,UNFCCC, diakses dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp> (25/06/2021 10.10 WIB)

KOMPAS.COM, *Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur*, diakses dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/05/154922069/masa-reformasi-di-bawah-pemerintahan-gus-dur?page=all> (25/06/2021 10.37 WIB)

TEKNO.KOMPAS, *Politik Luar Negeri Gus Dur*, diakses dalam <https://tekno.kompas.com/read/2010/01/02/0253398/.politik.luar.negeri.gus.dur?page=all> (25/06/2021 11.05 WIB)

MEDIAINDONESIA, *70 tahun Hubungan Indonesia- Tiongkok*, diakses dalam [https://mediaindonesia.com/opini/307777/70-tahun-hubungan-indonesia-tiongkok\(11/04/2022\)](https://mediaindonesia.com/opini/307777/70-tahun-hubungan-indonesia-tiongkok(11/04/2022))

Persepsi Soeharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru Hafid Adim Pradana Universitas Muhammadiyah Malang (diakses 12 April 2022)

DETIK.COM, *Berita Ekonomi Bisnis*, diakses dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4310113/flashback-ekonomi-di-zaman-orde-baru> (13/04/2022)

TIRTO.ID, *Hubungan Indonesia-Cina*, diakses dalam <https://tirto.id/btyh> (13/04/ 2022)

KEMENKEU.GO.ID, *Yang dimaksud dengan Bebas Aktif Kekuatan Dunia*, diakses <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%22bebas%20aktif,kekuatan%20dunia%20serta%20secara%20aktif> (28/04 2022; 01:07 WIB)